



# LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANJAR**

Disusun oleh:  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Banjar

**TAHUN 2026**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. MAKSUD DAN TUJUAN

#### A.1 Maksud Laporan.

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banjar
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banjar
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

#### A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banjar kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banjar
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.

## B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

### B.1 Tugas Pokok

Bakesbangpol mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

### B.2 Fungsi

Badan Kesatuan bangsa dan Politik untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.
- c) Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.
- e) Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
- f) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bakesbangpol.
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **B.3 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang menjadi acuan penyusunan laporan kinerja adalah sebagai berikut:

- 1.** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421).
- 2.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700).
- 3.** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58).
- 4.** Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322).
- 5.** Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 187).
- 6.** Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80).
- 7.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- 8.** Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
- 9.** Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor

1569).

- 10.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
- 11.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
- 12.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019.
- 13.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, serta Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.
- 14.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 15.** Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 16.** Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 17.** Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- 18.** Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
- 19.** Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, tambahan lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 4).

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
24. SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.

#### **B.4 Struktur Organisasi**

Susunan organisasi SKPD terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Sub Bagian Perencanaan
  2. Sub Bagian Keuangan Dan Aset
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
  1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
  1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
  2. Sub Bidang Penanganan Konflik
- e. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
  1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri
  2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

#### **1.5 Isu Strategis**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Ruang lingkup tugas tersebut mencakup bidang Ketahanan Ideologi dan Kewaspadaan Daerah, Ketahanan Seni Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan, serta Politik Dalam Negeri. Dengan peran yang sangat strategis ini, Bakesbangpol diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang dapat menjaga stabilitas daerah, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik dan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, analisis isu strategis menjadi langkah awal yang sangat penting dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Isu strategis sendiri dapat dipahami sebagai permasalahan yang masih belum terselesaikan (*unresolved problem*) dan diproyeksikan untuk ditangani dalam kurun waktu perencanaan. Identifikasi isu dilakukan melalui proses penapisan dengan menggunakan kriteria yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sehingga diperoleh isu-isu prioritas yang kemudian menjadi dasar dalam perumusan strategi dan kebijakan. Isu strategis yang telah dianalisis ini selanjutnya juga tercermin dalam dokumen perencanaan daerah serta dituangkan kembali pada dokumen pelaporan kinerja SKPD, maka isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut : Rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada.

Pada Pilkada tahun 2024 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 436.245 orang, namun hanya 289.678 yang tercatat menggunakan hak pilih, atau sekitar 67,9%. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran politik masyarakat, yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik, adanya rasa apatis terhadap proses politik, serta rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik maupun penyelenggara pemilu. Rendahnya partisipasi politik ini berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi lokal dan legitimasi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan literasi politik, sosialisasi yang intensif dan kreatif, serta penguatan pendidikan politik yang menysasar seluruh lapisan masyarakat, khususnya pemilih pemula dan kelompok rentan.

#### 1. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang masih tinggi.

Fenomena narkoba masih menjadi ancaman serius yang menysasar berbagai

kalangan, tidak hanya masyarakat perkotaan tetapi juga pelajar dan warga di pedesaan. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu stabilitas sosial, menurunkan kualitas generasi muda, serta menjadi pintu masuk bagi berbagai permasalahan kriminalitas. Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang telah dicanangkan pemerintah perlu didukung secara lebih masif melalui sinergi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Edukasi bahaya narkoba juga harus diperluas ke sekolah-sekolah, pesantren, dan komunitas masyarakat, agar tercipta lingkungan sosial yang tangguh dalam menghadapi ancaman narkoba.

## 2. Penguatan fungsi dan legalitas organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Masih terdapat sejumlah organisasi kemasyarakatan yang belum terdaftar secara resmi atau tidak memiliki badan hukum. Kondisi ini menimbulkan potensi masalah, baik dari sisi legalitas maupun aktivitas organisasi yang tidak sejalan dengan kepentingan umum dan pembangunan daerah. Apabila tidak diawasi dan dibina, keberadaan ormas non-legal dapat menimbulkan gesekan sosial bahkan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Oleh karena itu, penguatan fungsi ormas perlu dilakukan melalui fasilitasi legalitas, peningkatan kapasitas organisasi, pembinaan berkelanjutan, serta pengawasan yang tegas namun tetap humanis. Diharapkan, ormas dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan daerah dan menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

## 3. Kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial.

Potensi konflik sosial di Kabupaten Banjar masih cukup tinggi, baik yang disebabkan oleh perbedaan politik, ekonomi, agama, maupun budaya. Namun peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam deteksi dini masih belum optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi yang belum maksimal, serta minimnya dukungan anggaran menjadi faktor penghambat utama. Padahal, kewaspadaan dini sangat penting untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih besar dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran FKDM melalui pelatihan, penguatan jaringan informasi, serta peningkatan sinergi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat, agar upaya deteksi dan pencegahan konflik dapat berjalan efektif.

## 4. Rendahnya literasi politik dan wawasan kebangsaan.

Sebagian besar masyarakat, khususnya generasi muda, masih memiliki

pemahaman yang rendah terhadap nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pentingnya partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi. Minimnya pendidikan politik yang menarik, ditambah dengan maraknya arus informasi di media sosial yang sering kali memicu polarisasi, disinformasi, bahkan radikalisasi, membuat kondisi ini semakin kompleks. Rendahnya literasi politik dapat berdampak pada rendahnya kualitas demokrasi, munculnya sikap intoleransi, serta melemahnya rasa cinta tanah air. Untuk mengatasi hal ini, perlu program edukasi yang inovatif, berbasis sekolah, perguruan tinggi, komunitas, dan media digital. Pemerintah daerah juga dapat menggandeng tokoh masyarakat, akademisi, serta organisasi kepemudaan dalam menyelenggarakan sosialisasi kebangsaan yang berkesinambungan.

#### 5. Optimalisasi peran Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).

FKUB memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, namun saat ini perannya masih belum optimal karena keterbatasan dukungan kelembagaan dan minimnya fasilitasi terhadap kegiatan dialog lintas agama. Padahal, Kabupaten Banjar memiliki keragaman agama dan keyakinan yang berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. FKUB seharusnya menjadi wadah komunikasi dan kerja sama yang efektif dalam memperkuat harmoni sosial, mencegah intoleransi, dan membangun semangat kebersamaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan FKUB melalui dukungan anggaran, penyediaan fasilitas kegiatan, serta peningkatan kapasitas pengurus. Kegiatan dialog, edukasi lintas agama, dan kerja sama dalam bidang sosial kemasyarakatan juga perlu diperluas agar FKUB benar-benar berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa di daerah.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dalam pelaksanaannya, kondisi dan cita-cita yang telah dirumuskan melalui visi daerah dicapai melalui berbagai langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan ini dituangkan dalam bentuk misi daerah yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang. Dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, terdapat empat misi besar yang memandu proses pembangunan daerah yang telah menggambarkan empat dimensi utama pembangunan, yaitu: sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya
2. Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan
3. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Bakesbangpol Kabupaten Banjar berusaha turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar melalui RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2025-2029. Dari keempat misi di atas Bakesbangpol Kabupaten Banjar berkewajiban ikut mendukung terlaksananya misi pertama yaitu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banjar mengambil peran sebagai salah satu unsur pendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, khususnya di bidang kesatuan bangsa, pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, serta ketahanan nasional di daerah.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten banjar**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat perkembangan dan kualitas demokrasi di suatu wilayah. Indeks ini disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu <b>dimensi kebebasan, dimensi kesetaraan (hak-hak politik), dan dimensi kapasitas lembaga demokrasi</b> , yang mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	<p>a) Klasifikasi dan Kodefikasi Data: Tahap awal analisis dilakukan dengan menata seluruh temuan dari berbagai sumber ke dalam 22 indikator IDI. Setiap peristiwa, kebijakan, atau aktivitas sosial-politik yang ditemukan melalui dokumen resmi, pemberitaan media, atau hasil FGD dikategorikan ke dalam indikator yang sesuai berdasarkan tabel operasionalisasi IDI Banjar 2025.</p> <p>b) Pemberian Skor Aktual: Data diklasifikasi, setiap indikator diberi skor aktual (<math>X_i</math>) berdasarkan hasil kompilasi bukti lapangan, dokumen resmi, dan konfirmasi dari peserta FGD. Skor ini mencerminkan nilai kuantitatif dari kondisi demokrasi Kabupaten Banjar pada tahun 2025.</p> <p>c) Normalisasi Nilai Indikator: (rumus 1)</p> <p style="text-align: center;"><b>❖ Normalisasi Nilai Indikator</b></p> <p>atau, jika arah hubungan indikator negatif, maka</p> $I_i = 100 \times \frac{(X_{max} - X_i)}{(X_{max} - X_{min})}$ <p>Keterangan:  <math>I_i</math> = Nilai indeks indikator ke-i,  <math>X_i</math> = Nilai aktual indikator,  <math>X_{max}</math> = Nilai ideal (terbaik),  <math>X_{min}</math> = Nilai terburuk.</p> <p>d) Pembobotan Indikator dan Aspek: (rumus 2)</p>	Kepala Badan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
				<p>❖ <b>Pembobotan Indikator dan Aspek</b>  Pembobotan dengan hasil <i>Analytic Hierarchy Process</i> (AHP) yang ditetapkan BPS (2021). Bobot mencerminkan kontribusi relatif tiap indikator terhadap aspek demokrasi yang diwakilinya</p> $I_{\text{aspek}} = \sum_{i=1}^n (w_i \times I_i)$ <p>Pembobotan dengan hasil <i>Analytic Hierarchy Process</i> (AHP) yang ditetapkan BPS (2021). Bobot mencerminkan kontribusi relatif tiap indikator terhadap aspek demokrasi yang diwakilinya.</p> <p>e) Bobot Aspek IDI Komposit: (1) Aspek Kesetaraan, Bobot 0,376, Peringkat 1; (2) Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, Bobot 0,314, Peringkat 2; (3) Aspek Kebebasan, Bobot 0,310, Peringkat 3.</p> <p>f) Nilai Hasil Akhir: Kategori Tinggi (interval nilai &gt;80), Kategori Sedang (interval nilai 60 - 80), Kategori Rendah (interval nilai &lt;40)</p>	
2.	Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO) merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat efektivitas, partisipasi, dan ketahanan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung stabilitas sosial politik di daerah. IKO disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu dimensi kerawanan, dimensi partisipasi, dan dimensi kelembagaan, yang secara bersama-sama mencerminkan kinerja dan peran ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	<p>IKO</p> <p>Keterangan:  a) IKO : Indeks Ketahanan Ormas  b) Dimensi Kelembagaan : Menggambarkan kekuatan organisasi dari sisi legalitas, kepengurusan, dan program kerja.  c) Dimensi Partisipasi : Menunjukkan tingkat keterlibatan ormas dalam kegiatan sosial, politik, dan kemasyarakatan.  d) Dimensi Kerawanan : Menunjukkan tingkat potensi konflik, radikalisme, atau penyalahgunaan ormas (semakin rendah kerawanan, semakin tinggi nilainya).</p>	
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai Sakip PD adalah hasil pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta pencapaian sasaran kinerja suatu perangkat daerah berdasarkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja intern</p> <p>Nilai S akip PD merupakan indikator akuntabilitas dan kualitas manajemen kinerja yang menggambarkan sejauhmana PD mampu mengelola sumber daya publik untuk mencapai tujuan pemerintah daerah secara efektif dan efisien.</p> <p>Kategori penilaian :  AA : &gt; 90 – 100 (Sangat Memuaskan)  A : &gt; 80 – 90 (Memuaskan)  BB : &gt; 70 – 80 (Sangat Baik)  B : &gt; 60 – 70 (Baik)  CC : &gt; 50 – 60 (Cukup Memadai)</p>	<p>Nilai SAKIP PD = (P x 0,30) + (M x 0,30) + (L x 0,15) + (E x 0,25)</p> <p>Keterangan :  P (Perencanaan Kinerja = Bobot 30%)  M (Pengukuran Kinerja = Bobot 30%)  L (Pelaporan Kinerja = Bobot 15%)  E (Evaluasi akuntabilitas kinerja intern = Bobot 25%)</p>	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
			C : > 30 – 50 (Kurang) D : > 0 – 30 (Sangat Kurang)		

## B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang ada dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target tahunan	Target Triwulan I	Satuan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3		4	5	6	7	9	10
1	Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di di daerah	indeks Demokrasi indonesia	<p>❖ <u>Normalisasi Nilai Indikator</u></p> <p>atau, jika arah hubungan indikator negatif, maka</p> $I_i = 100 \times \frac{(X_{max} - X_i)}{(X_{max} - X_{min})}$ <p>Keterangan:                      I<sub>i</sub>= Nilai indeks indikator ke-i,                      X<sub>i</sub>= Nilai aktual indikator,                      X<sub>max</sub>= Nilai ideal (terbaik),                      X<sub>min</sub>= Nilai terburuk.</p>	80,85	-	Nilai indeks	Prog Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4.137.090.000	Kepala Badan
2	Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	IKO	74,5	-	Nilai indeks	Prog Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	424.138.000	Kepala Badan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD = (P x 0,30) + (M x 0,30) + (L x 0,15) + (E x 0,25)	78,75	-	Nilai	prog Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.959.383.800	Kepala Badan
4	Meningkatnya kepatuhan dan Kinerja Intern perangkat daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Σ(Perencanaan Kinerja 30% + Pengukuran Kinerja 30% + Pelaporan Kinerja 15%+ Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%)	84,90	-	Nilai	Prog Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.959.383.800	Sekretaris
5	terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan ,Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai		100	30	Persen	Keg Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.970.800	Kasubag Perencanaan

		ketentuan								
6	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah		100	25	persen	Keg	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.460.913.000	Kasubag keuangan
7	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas		100	25	persen	Keg	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas		100	25	persen	Keg	Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.385.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas		100	100	persen	Keg	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.140.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas		100	25	persen	Keg	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	417.945.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
11	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas		100	25	persen	Keg	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	409.030.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
12	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100	25	Persen	prog	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.524.936.000	Kabid Ideologi dan ketahanan ekonomi,sosial,,budaya,agama

13	Meningkatnya kualitas kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di Bidang Ekososbud yang dikeluarkan sesuai standar		100	0	persen	prog	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	815.207.600	Kabid Ideologi dan ketahanan ekonomi,sosial,,budaya,agama
14	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		82	82	Persen	keg	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.524.936.000	Kasubbid Ideologi dan wawasan Kebangsaan
15	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		82	82	persen	keg	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	815.207.600	Kasubbid Ketahanan ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama
16	Meningkatnya peran FKUB dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama	Persentase Rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti		100	100	Persen	Keg	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	815.207.600	Kasubbid Ketahanan ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama
17	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik		100	25	Persen	prog	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4.137.090.000	Kabid politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
18	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif melaporkan keberadaannya		41	40.48	Persen	prog	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	424.138.000	Kabid politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

19	Terselenggaranya pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat	Persentase kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang terlaksana		100	25	persen	Keg	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	4.137.090.000	Kasubbid Politik dalam Negeri
20	Meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)		91.2	91.2	Persen	Keg	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	424.138.000	Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan
21	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan		100	100	Persen	prog	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.368.700.000	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
22	Meningkatnya kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen		100	100	Persen	Keg	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.368.700.000	Plt Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
23	Meningkatnya tindak lanjut penanganan konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti		100	100	Persen	keg	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.368.700.000	Plt Kasubbid Penanganan Konflik

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Terdapat beberapa tahapan didalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Perjanjian kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2026.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

**Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah**

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di di daerah	indeks Demokrasi indonesia	Nilai indeks	-	-	-	Target pada TW4
2	Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	Nilai indeks	-	-	-	Target pada TW4
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	Target pada TW4
4	Meningkatnya kepatuhan dan Kinerja Intern perangkat daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	-	-	-	Target pada TW4
5	terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan ,Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persen	30	30	100	

6	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	persen	25	25	100	
7	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	persen	25	25	100	
8	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	persen	25	25	100	
9	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	persen	25	25	100	
10	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas	persen	25	25	100	
11	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	persen	25	25	100	
12	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	25	25	100	
13	Meningkatnya kualitas kebijakan ketahanan	Persentase kebijakan di Bidang Ekososbud yang dikeluarkan	persen	-	-	-	

	ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	sesuai standar					
14	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	82	83	102	
15	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	persen	82	80	97.56	
16	Meningkatnya peran FKUB dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama	Persentase Rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100	
17	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	25	25	100	
18	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif melaporkan keberadaannya	Persen	40.48	40.21	99	
19	Terselenggaranya pembinaan dan pendidikan	Persentase kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang	persen	25	25	100	

	politik kepada masyarakat	terlaksana					
20	Meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)	Persen	91.2	90.70	99	
21	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	25	25	100	
22	Meningkatnya kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	Persen	100	100	100	
23	Meningkatnya tindak lanjut penanganan konflik sosial	Persentase penangan konflik sosial yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	

## A.1 HASIL CAPAIAN TARGET KINERJA

1. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di di daerah

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) yang bertujuan menilai tingkat perkembangan demokrasi di wilayah Kabupaten Banjar berdasarkan data dan peristiwa aktual. Pengukuran IDI akan dilaksanakan pada triwulan IV.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini IKO (Indeks kinerja ormas) yang bertujuan untuk mengukur secara objektif dan sistematis sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas ormas dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Hasil Pengukuran IKO akan dapat dilihat pada triwulan IV.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja pada sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target nilai 78.75. Hal ini memiliki tujuan utama untuk menilai dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran berbasis hasil (outcome), bukan hanya sekadar pelaporan administrasi. Hasil Pengukuran predikat SAKIP akan dapat dilihat pada triwulan IV.

4. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Internal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesbangpol” dimana pada tahun 2026 target kinerjanya adalah nilai indeks sebesar 84,90 poin dan nilai capaian akan diterima pada triwulan IV.

5. Sasaran Kinerja Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan” dengan perhitungan jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang berhasil disusun dibagi jumlah dokumen yang ditargetkan untuk disusun, dimana targetnya pada triwulan I adalah 30% atau sebanyak 11 dokumen dari total 37 dokumen, dengan realisasi 11 dokumen yang berhasil

disusun sehingga capaiannya adalah sebesar 30 persen, sehingga persentase capaiannya sebesar 100% persen. Dokumen perencanaan antara lain perjanjian kinerja 2026, rencana aksi tahun 2026, Rencana Kerja 2027. Laporan capaian kinerja LPPD 2025, LKPJ 2025, LKjIP 2025. Penganggaran berupa RKA Pergeseran. Evaluasi Kinerja sejumlah tiga bulan yaitu bulan januari, februari dan maret serta laporan renja melalui SAKIP SIMONDALEV.

6. Sasaran Kinerja Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah persentase laporan keuangan perangkat daerah. Dokumen keuangan adalah dokumen penatausahaan /pengujian/verifikasi keuangan yang terdiri dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Langsung (LS), Tambah Uang (TU), dan dokumen SPJ. Penyusunan dokumen dokumen tidak boleh menyalahi aturan/spesifikasi yang berlaku sesuai dengan peraturan peraturan undang-undang. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah dokumen penatausahaan keuangan/verifikasi keuangan dibagi dengan jumlah seluruh dokumen penatausahaan keuangan verifikasi . Target indikator ini pada triwulan I sebesar 25% dengan realisasi sebesar 25%, sehingga persentase capaiannya sebesar 100% persen.

7. Lancarnya administrasi kepegawaian perangkat daerah

Sasaran strategis "Lancarnya administrasi kepegawaian perangkat daerah" diukur melalui indikator Persentase administrasi kepegawaian yang berkualitas. Target kinerja pada Triwulan I adalah sebesar 25%, dengan realisasi 25%, dan capaian 100% terhadap target. Hasil ini diambil dari tercapainya 2 pegawai yang mengikuti bimbingan teknis sesuai dengan target yang ditentukan. Selain itu, pengelolaan absensi dan rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan, Penyusunan dan pembaruan data kepegawaian melalui aplikasi Simpeg, Pengusulan kenaikan pangkat dan penyesuaian jabatan fungsional, Pengelolaan cuti pegawai, termasuk administrasi izin dan surat tugas, Pemrosesan penilaian kinerja pegawai (SKP dan e-Kinerja), Pengelolaan arsip kepegawaian dan surat-menyurat kedinasan.

8. Sasaran Kinerja Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas. Penyelenggaraan penunjang administrasi umum yang

berkualitas adalah persentase laporan administrasi umum (surat menyurat, arsip dan laporan kegiatan umum lainnya) yang memenuhi kriteria kualitas dari total laporan yang wajib disusun pada periode tertentu. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah laporan administrasi umum yang berkualitas dibagi dengan jumlah laporan administrasi umum yang harus disusun/ditargetkan x 100%. Target indikator ini pada triwulan 1 sebesar 25% dengan realisasi sebesar 25%, sehingga persentase capaiannya sebesar 100% persen.

9. Sasaran Kinerja Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “Persentase Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan yang berkualitas” adapun perhitungan indikatornya adalah jumlah pengadaan dengan target 100 persen atau 8 buah, realisasi 62.5 persen atau 5 buah, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 62.5 persen. Pengadaan terdiri dari pengadaan peralatan computer 1 buah, printer 1 buah, AC Standing 2 buah dan kulkas 1 buah. Pengadaan yang belum realisasi adalah karpet, sound system dan backdrop.

10. Sasaran Kinerja Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas. Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang berkualitas adalah persentase laporan jasa penunjang pelayanan umum yang disusun sesuai standar kualitas dari total laporan yang wajib disusun. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah laporan jasa penunjang yang berkualitas dibagi dengan jumlah laporan jasa penunjang yang harus disusun/ditargetkan x 100% . Target indikator ini pada triwulan I sebesar 25% dengan realisasi sebesar 25%, sehingga persentase capaiannya sebesar 100% persen.

11. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah “Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas”. Terpeliharanya barang milik daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan adalah persentase unit sarana dan prasarana (BMD) yang tersedia dan sesuai kebutuhan serta memenuhi standar kualitas (berfungsi dengan baik dan layak pakai). Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah unit sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan berkualitas dibagi dengan jumlah total kebutuhan sarana dan prasarana (barang

milik daerah) . Target indikator ini pada triwulan I sebesar 25% dengan realisasi sebesar 25%, sehingga persentase capaiannya sebesar 100% persen.

12. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target 25 persen atau sejumlah 1 jenis elemen Masyarakat yaitu Aparat Desa/Kecamatan dari total 4 yaitu Pelajar/Mahasiswa, Aparat Desa/Kecamatan, Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat capaiannya pada triwulan ketiga adalah sebesar 25 persen, sehingga persentase capaiannya sebesar 100% persen.

13. Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang disusun sesuai dengan ketentuan dan standar penyusunan kebijakan terhadap jumlah keseluruhan kebijakan yang dihasilkan pada periode berjalan. Pada tahun 2026 Triwulan I, target kinerja ditetapkan masih 0 persen, target kinerja akan dimulai pada triwulan II.

14. Sasaran Kinerja Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “ Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan” dimana indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah jumlah peserta yang diberikan pemahaman, dengan target 82 persen, pada tahun 2026 triwulan I capaian realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 83 persen, sehingga persentase capaiannya sebesar 100 persen. Perhitungannya adalah dari 2 kegiatan dengan jumlah 120 peserta, sebanyak 100 peserta masuk kategori faham. Sehingga capaiannya adalah 83 persen.

15. Sasaran Kinerja Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “ Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya” dimana indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah jumlah

peserta yang diberikan pemahaman, dengan target 82 persen, pada tahun 2026 triwulan I capaian realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 80 persen, sehingga persentase capaiannya sebesar 100 persen. Perhitungannya yaitu dari 4 kegiatan yang dilaksanakan dengan total 240 peserta yang masuk kategori memahami adalah berjumlah 192 peserta, sehingga capaiannya 80 persen.

16. Sasaran Kinerja Meningkatnya peran FKUB dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “Persentase Rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti” dimana indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi resmi yang disampaikan oleh FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang telah direspons secara nyata oleh pemerintah daerah, dengan target 100 persen, pada tahun 2025 triwulan I capaian realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 100 persen, sehingga persentase capaiannya sebesar 100 persen.

17. Sasaran Kinerja Meningkatnya etika dan budaya politik

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “Persentase Pendidikan politik pada kader partai politik”. Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah partai politik penerima bantuan keuangan yang telah melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi kadernya dengan jumlah seluruh partai politik penerima bantuan keuangan pada periode yang sama, yang kemudian dikalikan 100 persen. Pada Triwulan I Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 25 persen, dengan realisasi sebesar 25 persen, sehingga persentase capaian terhadap target mencapai 100 persen. Capaian ini diperoleh setelah realisasi anggaran bantuan keuangan partai politik diterima oleh partai politik, yang kemudian digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan politik bagi kader dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

18. Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “Persentase Ormas yang aktif melaporkan keberadaannya” dimana target indikator tersebut pada triwulan pertama ini adalah 40.48 persen, dengan realisasi 40.21 persen. Sehingga capaian pada indikator ini adalah 99 persen. Perhitungannya yaitu jumlah ormas yang aktif

yang melaporkan keberadaanya di Bakesbangpol Kabupaten Banjar dibagi dengan jumlah seluruh Ormas di Kabupaten Banjar x 100. Jumlah ormas yang aktif melaporkan keberadaanya sampai dengan triwulan I yaitu 300 dibagi dengan jumlah ormas keseluruhan 746 x 100 = 40.21%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap Ormas telah berjalan sesuai dengan rencana, serta mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan Ormas dalam memenuhi kewajiban pelaporan keberadaan organisasi kepada pemerintah daerah.

19. Sasaran Kinerja Terselenggaranya pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang terlaksana dengan jumlah seluruh kegiatan yang direncanakan dalam periode berjalan, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 25 persen, dengan realisasi sebesar 25 persen, sehingga persentase capaian terhadap target mencapai 100 persen. Hasil ini diperoleh dari total 1 kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang direncanakan, dengan 1 kegiatan yang telah terlaksana pada triwulan I. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan dan warga di Kecamatan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan dan pendidikan politik berjalan efektif dan mampu melampaui target yang ditetapkan pada triwulan ini.

20. Sasaran Kinerja Meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah "Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)" target 91% dan realisasi pada triwulan I adalah 90,7 persen, sehingga capaiannya adalah 99%. Perhitungannya yaitu persentase ormas yang terlegalisasi di kemendagri dan terdaftar di kemenkumham RI (677 ormas) dibagi dengan jumlah ormas yang ada dikabupaten banjar (746) x 100 maka didapat persentase 90,7%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar Ormas di Kabupaten Banjar telah memiliki legalitas formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran organisasi dalam memenuhi persyaratan administratif dan hukum.

21. Sasaran Kinerja Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “ Persentase konflik sosial yang diselesaikan” dimana indikator kinerja ini dihitung berdasarkan Jumlah kejadian atau situasi yang berpotensi menjadi konflik sosial berdasarkan hasil pemetaan, laporan masyarakat, intelijen daerah, forum deteksi dini, dengan target 100 persen, pada tahun 2026 triwulan I realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 100% persen, sehingga persentasenya sebesar 100% persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh potensi konflik sosial yang teridentifikasi telah ditangani melalui koordinasi lintas sektor bersama unsur Forkopimda, FKDM, FKUB, serta perangkat daerah terkait, sehingga mampu mencegah terjadinya eskalasi konflik di masyarakat.

22. Sasaran Kinerja Meningkatnya kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen” dimana indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah peserta yang diberikan pemahaman terkait kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, dengan target 100 persen, dengan realisasi 100 persen pada tahun 2026 triwulan I capaian realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. Capaian ini menggambarkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pembinaan kewaspadaan dini telah dilaksanakan sesuai rencana, dengan partisipasi aktif masyarakat, aparat desa, dan unsur FKDM dalam mendeteksi serta mencegah potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

23. Sasaran Kinerja Meningkatnya tindak lanjut penanganan potensi konflik sosial

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “Persentase penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti” Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas deteksi dini dan respons pemerintah daerah atau instansi seperti Kesbangpol, FKDM, atau Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam menindaklanjuti potensi konflik yang muncul di masyarakat. Kesbangpol pada triwulan kedua selalu merespon potensi konflik yang timbul pada triwulan pertama tahun 2026, target pada triwulan kedua adalah 100%, realisasi 100%. Sehingga capaian yang didapat adalah 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa setiap potensi konflik sosial yang muncul telah mendapat respons cepat melalui langkah koordinatif antara

Kesbangpol, FKDM, FKUB, dan instansi terkait lainnya, sehingga mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Banjar.

## **A.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan atau kegagalan suatu sasaran kinerja dapat dilihat dari keberhasilan indikator kinerja yang tercapai dari target kinerja. Kegagalan suatu sasaran kinerja tentunya memerlukan alternatif solusi dalam pencapaiannya. Adapun analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah atau akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan sebagai berikut :

### **1. Meningkatnya Kualitas Kebebasan Sipil, Pemenuhan Hak-Hak Politik, dan Penguatan Lembaga Demokrasi di Daerah**

Pelaksanaan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) belum dilakukan karena menunggu jadwal nasional pada Triwulan IV. Namun, tahap persiapan data dan koordinasi dengan lembaga pelaksana telah berjalan baik.

#### **Faktor Pendorong:**

- Koordinasi dengan lembaga pelaksana IDI berjalan baik.
- Dukungan pimpinan terhadap pelaksanaan pengukuran IDI.

#### **Faktor Penghambat:**

- Proses penyusunan IDI Kabupaten masih berjalan bersama pihak akademisi sehingga hasil akhir belum dapat dipublikasikan.

#### **Upaya yang Dilakukan:**

- Mempercepat finalisasi kerja sama dengan lembaga survei atau akademisi agar pelaksanaan IDI dapat dilakukan tepat waktu.

### **2. Meningkatnya Kapasitas dan Kontribusi Organisasi Kemasyarakatan**

Pelaksanaan pengukuran Indeks Kinerja Ormas (IKO) belum dilakukan karena menunggu jadwal pengukuran pada Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan IV. Namun, tahap persiapan data dan koordinasi dengan lembaga pelaksana telah berjalan baik.

#### **Faktor Pendorong:**

- Koordinasi aktif dan pembinaan berkelanjutan kepada ormas.

- Partisipasi ormas dalam kegiatan pembinaan meningkat.

**Faktor Penghambat:**

- Masih terdapat ormas dengan kapasitas kelembagaan rendah dan partisipasi terbatas.

**Upaya yang Dilakukan:**

- Meningkatkan pendampingan dan pelatihan manajemen organisasi bagi ormas dengan indeks kelembagaan rendah.

### **3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu Predikat SAKIP Perangkat Daerah. Pada indikator sasaran strategis ini dengan target pada triwulan IV yaitu 78,75. Pencapaian indikator kinerja ini dapat dilihat dari hasil penilaian dari Inspektorat. Pada tahun sebelumnya, berdasarkan penilaian dari Inspektorat, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar menunjukkan nilai yaitu 77,53 atau predikat BB (Sangat Baik). Dilihat dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi tersebut belum mencapai target.

**Faktor Pendorong:**

- Telah selesainya penyusunan dokumen perencanaan seperti Renstra Tahun 2025-2029, Pohon Kinerja, Cascading, SK IKU, Renja Perubahan 2025, Renja Tahun 2026, Perjanjian Kinerja Perubahan, dan Rencana Aksi Perubahan sebagai dokumen yang dievaluasi pada penilaian SAKIP
- Adanya koordinasi dengan pihak inspektorat terkait penilaian SAKIP dan realisasi pada triwulan III untuk sementara menggunakan nilai dari hasil penilaian sementara sesuai catatan hasil evaluasi SAKIP.

**Faktor Penghambat:**

- Beberapa rekomendasi hasil evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

**Upaya yang Dilakukan:**

- Berkoordinasi dengan tim evaluator mengenai SAKIP yang telah disusun
- Menyusun langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi CHE AKIP agar nilai SAKIP meningkat sesuai target.

### **4. Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Internal**

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Internal (IKKI) belum dirilis karena menunggu hasil penilaian triwulan IV. Namun, pelaksanaan SOP dan pelaporan telah berjalan sesuai pedoman.

**Faktor Pendorong:**

- Pelaksanaan SOP berjalan tertib.
- Disiplin pegawai dalam pelaksanaan tugas meningkat.

**Faktor Penghambat:**

- Belum tersedia hasil resmi penilaian IKKI sehingga fokus perbaikan belum spesifik.

**Upaya yang Dilakukan:**

- Melakukan evaluasi internal awal untuk mendeteksi area perbaikan lebih dini.

**5. Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah**

Target 73% tercapai penuh berkat koordinasi antarbidang dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan.

**Faktor Pendorong:**

- Koordinasi antarbidang berjalan baik.
- Disiplin terhadap jadwal penyusunan dokumen.

**Faktor Penghambat:**

- Perbedaan data dan informasi antarbidang berpotensi menunda proses finalisasi.

**Upaya yang Dilakukan:**

- Menjaga konsistensi jadwal dan meningkatkan sinkronisasi data lintas bidang.

**6. Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

Target 75% tercapai dengan baik. Pengelolaan keuangan telah sesuai peraturan dan tata administrasi yang tertib.

**Faktor Pendorong:**

- Pengelolaan keuangan sesuai peraturan.
- SDM keuangan memahami sistem pelaporan.

**Faktor Penghambat:**

- Masih terdapat potensi kesalahan administrasi dalam verifikasi dokumen.

**Upaya yang Dilakukan:**

- Meningkatkan ketelitian dan pengawasan dalam proses verifikasi.

## **7. Lancarnya Administrasi Kepegawaian**

Seluruh kegiatan kepegawaian berjalan lancar dengan capaian 100%.

Dukungan sistem Simpeg dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor utama.

### **Faktor Pendorong:**

- Pemanfaatan sistem Simpeg mempermudah administrasi.
- Disiplin pegawai meningkat.

### **Faktor Penghambat:**

- Masih ada data pegawai yang perlu diperbarui.

### **Upaya yang Dilakukan:**

- Melakukan evaluasi periodik terhadap administrasi dan pembinaan ASN.

## **8. Lancarnya Administrasi Umum**

Seluruh laporan administrasi umum tersusun sesuai standar dengan capaian 100%.

### **Faktor Pendorong:**

- Koordinasi internal berjalan baik.
- Kedisiplinan dalam pelaporan meningkat.

### **Faktor Penghambat:**

- Pengelolaan arsip manual masih menyulitkan pencarian data.

### **Upaya yang Dilakukan:**

- Melakukan digitalisasi arsip untuk efisiensi dan kemudahan akses data.

## **9. Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah**

Target pengadaan 75% tercapai sesuai jadwal dan ketentuan.

### **Faktor Pendorong:**

- Proses pengadaan berjalan tertib.
- Kinerja tim pengadaan baik.

### **Faktor Penghambat:**

- Perencanaan kebutuhan belum seluruhnya presisi.

### **Upaya yang Dilakukan:**

- Memperkuat perencanaan kebutuhan agar pengadaan lebih tepat sasaran dan efisien.

## **10. Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum**

Capaian 100% menunjukkan pelaksanaan layanan kantor berjalan optimal dan tepat waktu.

**Faktor Pendorong:**

- Koordinasi dengan penyedia jasa berjalan baik.
- Dukungan anggaran memadai.

**Faktor Penghambat:**

- Kualitas layanan tidak selalu seragam di semua unit kerja.

**Upaya yang Dilakukan:**

- Melakukan evaluasi kualitas layanan secara berkala untuk menjaga standar pelayanan umum.

**11. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan**

Pemeliharaan sarana dan prasarana berjalan sesuai rencana dengan capaian 100%.

**Faktor Pendorong:**

- Jadwal pemeliharaan rutin terlaksana.
- Seluruh aset dalam kondisi baik.

**Faktor Penghambat:**

- Dokumentasi jadwal perawatan belum sepenuhnya sistematis.

**Upaya yang Dilakukan:**

- Melakukan pengecekan dan perawatan preventif secara rutin.

**12. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila**

Target 25% tercapai dengan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembinaan ideologi.

**Faktor Pendorong:**

- Dukungan instansi terkait dan lembaga pendidikan.
- Antusiasme masyarakat tinggi.

**Faktor Penghambat:**

- Kegiatan belum menjangkau seluruh wilayah.

**Upaya yang Dilakukan:**

- Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan dan memperluas cakupan wilayah pembinaan.

**13. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Kebijakan bidang ekososbud disusun sesuai standar dengan koordinasi antarinstansi yang baik. Kebijakan berupa Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Banjar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

**Faktor Pendorong:**

- Kerjasama lintas sektor mendukung efektivitas kebijakan.
- Dokumen disusun tepat waktu.

**Faktor Penghambat:**

- Evaluasi implementasi kebijakan di lapangan belum maksimal.

**Upaya yang Dilakukan:**

- Melakukan evaluasi efektivitas implementasi kebijakan secara berkala.

**14. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila**

Capaian 100% menunjukkan efektivitas sosialisasi dan pembinaan ideologi.

**Faktor Pendorong:**

- Partisipasi masyarakat dan dukungan aparat desa tinggi.

**Faktor Penghambat:**

- Pemahaman masyarakat tidak merata antarwilayah.

**Upaya yang Dilakukan:**

- Memperkuat koordinasi dan pemerataan kegiatan pembinaan.

**15. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Ketahanan Ekososbud**

Program pembinaan masyarakat berjalan sesuai rencana dengan capaian penuh.

**Faktor Pendorong:**

- Dukungan tokoh masyarakat dan lembaga lokal.

**Faktor Penghambat:**

- Partisipasi masyarakat di wilayah terpencil masih terbatas.

**Upaya yang Dilakukan:**

- Mendorong keterlibatan tokoh masyarakat dalam memperluas jangkauan program.

**16. Meningkatnya Peran FKUB dalam Pencegahan Konflik**

Seluruh rekomendasi FKUB ditindaklanjuti dengan baik. Koordinasi lintas lembaga berjalan optimal.

**Faktor Pendorong:**

- FKUB aktif dalam pembinaan dan mediasi.
- Komunikasi antar lembaga terjaga.

**Faktor Penghambat:**

- Keterbatasan anggaran untuk mendukung pembinaan berkelanjutan.

**Upaya yang Dilakukan:**

- Peningkatan kapasitas FKUB dan optimalisasi dukungan dana hibah kegiatan.

**17. Meningkatnya Etika dan Budaya Politik**

Seluruh partai penerima bantuan telah melaksanakan pendidikan politik dengan capaian 100%.

**Faktor Pendorong:**

- Pengawasan pelaksanaan kegiatan berjalan baik.
- Partisipasi partai politik tinggi.

**Faktor Penghambat:**

- Laporan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya transparan.

**Upaya yang Dilakukan:**

- Meningkatkan pelaporan kegiatan pendidikan politik yang transparan dan akuntabel.

**18. Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan**

Persentase ormas aktif melapor 37% sesuai target.

**Faktor Pendorong:**

- Kesadaran ormas terhadap kewajiban administrasi meningkat.

**Faktor Penghambat:**

- Masih ada ormas yang belum tertib melapor.

**Upaya yang Dilakukan:**

- Sosialisasi intensif dan pemberian penghargaan bagi ormas tertib administrasi.

**19. Terselenggaranya Pembinaan dan Pendidikan Politik**

Capaian 102% menunjukkan pelaksanaan kegiatan melebihi target, dengan partisipasi masyarakat tinggi.

**Faktor Pendorong:**

- Antusiasme masyarakat tinggi.

- Dukungan partai politik dan pemerintah daerah.

**Faktor Penghambat:**

- Pelaksanaan di beberapa wilayah masih terbatas karena waktu dan lokasi.

**Upaya yang Dilakukan:**

- Memperluas wilayah pelaksanaan dan mempertahankan pola pembinaan partisipatif.

**20. Meningkatnya Legalitas Organisasi Kemasyarakatan**

Capaian 90,7% menunjukkan ormas di Banjar sudah tertib legalitas.

**Faktor Pendorong:**

- Pembinaan dan monitoring administrasi berjalan efektif.

**Faktor Penghambat:**

- Masih ada ormas baru yang belum memahami prosedur legalitas.

**Upaya yang Dilakukan:**

- Melakukan pembinaan rutin dan memperkuat layanan konsultasi legalitas.

**21. Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan**

Seluruh potensi konflik sosial berhasil diselesaikan melalui koordinasi lintas sektor.

**Faktor Pendorong:**

- Sinergi lintas sektor berjalan efektif.

**Faktor Penghambat:**

- Potensi konflik baru masih muncul di tingkat lokal.

**Upaya yang Dilakukan:**

- Memperkuat sistem deteksi dini dan pelatihan penanganan konflik di tingkat kecamatan.

**22. Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen**

Kegiatan sosialisasi kewaspadaan dini terlaksana baik dengan capaian 100%.

**Faktor Pendorong:**

- FKDM aktif dan koordinatif.
- Dukungan aparat wilayah tinggi.

**Faktor Penghambat:**

- Kapasitas deteksi dini belum merata di semua wilayah.

**Upaya yang Dilakukan:**

- Penguatan peran dan kapasitas FKDM dalam pelaksanaan deteksi dini.

## **23. Meningkatnya Tindak Lanjut Penanganan Potensi Konflik Sosial**

Setiap potensi konflik ditindaklanjuti cepat oleh Kesbangpol dan tim terpadu.

### **Faktor Pendorong:**

- Koordinasi cepat antarunsur FKDM, FKUB, dan aparat wilayah.

### **Faktor Penghambat:**

- Keterbatasan sumber daya di wilayah terpencil untuk pelaporan cepat.

### **Upaya yang Dilakukan:**

- Penguatan koordinasi dan pelaporan cepat antar unsur FKDM, FKUB, dan aparat wilayah.

## **A.3 PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

1. Sasaran Strategis kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di di daerah

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) yang bertujuan menilai tingkat perkembangan demokrasi di wilayah Kabupaten Banjar berdasarkan data dan peristiwa aktual. Pengukuran IDI akan dilaksanakan pada triwulan IV. Pada Triwulan I tahun 2026, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) melalui Program Pascasarjana (PPs) telah menyambut baik kerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Banjar Tahun 2026. Kerja sama ini menjadi langkah awal dalam memastikan proses pengumpulan dan analisis data IDI dilakukan secara objektif dan ilmiah. Sasaran Strategis ini didukung oleh Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu IKO (Indeks kinerja ormas) yang bertujuan untuk mengukur secara objektif dan sistematis sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas ormas dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Pada tahun sebelumnya Evaluasi Indeks Kinerja

Ormas (IKO) Kabupaten Banjar yaitu 74,17% yang masuk dalam kategori “Baik” atau “Emergent (Berkembang)” dengan range 61 sampai 80. Komposisi dimensi pembentuk Indeks Kinerja Ormas (IKO) Kabupaten Banjar yaitu Dimensi Kerawanan sebesar 82,50%, Dimensi Partisipasi sebesar 73,75% dan Dimensi Kelembagaan penyumbang IKO paling rendah yaitu sebesar 66,26%. Sedangkan untuk bidang Ormas yang menyumbang IKO tertinggi yaitu bidang pendidikan dengan indeks sebesar 80,10% yang masuk kategori “Baik” atau “Emergent (Berkembang)” dan bidang kesehatan dengan indeks sebesar 79,83 yang masuk kategori “Baik” atau “Emergent (Berkembang)”. Sedangkan penyumbang IKO paling rendah yaitu bidang sosial dengan indeks sebesar 72,05% atau masih kategori “Baik” atau “Emergent (Berkembang)”. Sasaran Strategis ini didukung oleh Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Pada tahun 2026 ini target pada IKO adalah sebesar 74,5 % dimana realisasi nya akan didapat pada triwulan IV.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja pada sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target nilai 78,75. Hal ini memiliki tujuan utama untuk menilai dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran berbasis hasil (outcome), bukan hanya sekadar pelaporan administrasi. Sasaran kinerja ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Internal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesbangpol” dimana pada tahun 2026 target kinerjanya adalah nilai indeks sebesar 84,90 poin dan nilai capaian akan diterima pada triwulan IV. Sasaran Kinerja ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Sasaran Kinerja Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan”. Adapun sub kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan

target kinerja adalah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, koordinasi dan penyusunan perubahan DPASKPD, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu telah melakukan penginputan Renja 2027 pada aplikasi SIPD, telah melakukan penyusunan dokumen Renja 2026 (penyempurnaan ranwal Renja 2027), telah selesai mengikuti desk terakhir penyusunan Renja 2026, telah melakukan beberapa penyesuaian pada dokumen rancangan akhir Renja 2027, telah menyusun dokumen Renja 2027 pada tahap penyelesaian Ranhir Renja 2027 yang diinput pada SIPD BAKESBANGPOL, telah mengikuti desk evaluasi renja 2027 dan Renja perubahan 2026 oleh Bapprida, telah melaksanakan finalisasi Renja 2027, telah melaksanakan koordinasi dengan bidang maupun sekretariat untuk penyusunan RKA, telah melaksanakan koordinasi dengan bidang maupun sekretariat untuk penginputan RKA pada aplikasi SIPD RI sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk anggaran BAKESBANGPOL, telah mempersiapkan bahan data capaian realisasi kinerja, telah mengikuti rapat pembahasan hasil realisasi kinerja, telah mengikuti asistensi dengan tim penyusunan laporan hasil kinerja daerah, telah mengikuti asistensi penyusunan laporan bupati, pencetakan dan penggandaan dokumen, koordinasi antar sub bagian perencanaan terkait persiapan pelaksanaan evaluasi kinerja, melakukan penyusunan laporan evaluasi rutin bulanan capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, melaksanakan koordinasi dengan operator bidang internal di BAKESBANGPOL terkait pelaporan rutin bulanan dan triwulanan, telah melakukan pembuatan laporan triwulan I, telah melaksanakan rapat internal BAKESBANGPOL terkait evaluasi kinerja perangkat daerah triwulan I, mengarsipkan dokumen-dokumen evaluasi kinerja, penyerahan dokumen evaluasi kepada pihak terkait, mengikuti kegiatan rapat asistensi pengisian simondalev, telah melakukan pembuatan laporan triwulan II, telah melaksanakan desk evaluasi kinerja triwulan II, telah mengikuti sosialisasi pemanfaatan modul e-validasi pada aplikasi simondalev dan sosialisasi Perbup No. 13 Tahun 2024, telah mengikuti

rapat monitoring dan evaluasi pembangunan daerah triwulan II, telah melakukan pembuatan laporan triwulan III, telah melaksanakan desk evaluasi triwulan III, telah melaksanakan rapat internal BAKESBANGPOL terkait evaluasi kinerja perangkat daerah triwulan III, telah mengikuti desk evaluasi triwulan IV, dan melakukan penyusunan laporan LKJIP Tahun 2025.

#### 6. Sasaran Kinerja Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah persentase laporan keuangan perangkat daerah. Dokumen keuangan adalah dokumen penatausahaan /pengujian/verifikasi keuangan yang terdiri dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Langsung (LS), Tambah Uang (TU), dan dokumen SPJ. Adapun sub kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu persiapan pelaksanaan atas pembayaran gaji ASN dan TPP ASN Bakesbangpol Kabupaten Banjar (pembuatan template, daftar gaji, daftar tambahan penghasilan PNS dan PPPK), pelaksanaan atas pembayaran gaji berupa input data sim gaji, payroll one step gaji, aplikasi SIPD penatausahaan, dan tambahan penghasilan pegawai, kepengurusan berkas yang sudah bertanda tangan lengkap diserahkan ke bpkpad untuk gaji ASN, tambahan penghasilan pegawai untuk proses selanjutnya, pembayaran honorarium bendahara pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD), petugas pembantu, pengurus barang dan pejabat pengadaan, telah melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun berupa neraca, LRA dan kalk tahun anggaran 2025, telah cetak dokumen laporan keuangan aaudit dan audited TA. 2025, untuk laporan keuangan TA.2025 baru tahap penginputan saldo awal 2026 dan jurnal balik untuk neraca, LO dan LPE, persiapan penginputan data SPJ keuangan berupa bukti LS, GU dan pajak pada aplikasi keuangan yang diterapkan yaitu SIPD RI dan SIPD langkar, melakukan pembayaran atas SPJ yang sudah

lengkap pada aplikasi IBB Bank Kalsel, menghimpun pelaporan keuangan bulanan pada aplikasi SIPD langkar, dan membuat rekonsiliasi pajak yang telah dibayarkan.

7. Lancarnya administrasi kepegawaian perangkat daerah

Sasaran strategis "Lancarnya administrasi kepegawaian perangkat daerah" diukur melalui indikator Persentase administrasi kepegawaian yang berkualitas. Target kinerja pada Triwulan I adalah sebesar 25%, dengan realisasi 25%, dan capaian 100% terhadap target. Hasil ini diambil dari tercapainya 2 pegawai yang mengikuti bimbingan teknis sesuai dengan target yang ditentukan. Selain itu, pengelolaan absensi dan rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan, Penyusunan dan pembaruan data kepegawaian melalui aplikasi Simpeg, Pengusulan kenaikan pangkat dan penyesuaian jabatan fungsional, Pengelolaan cuti pegawai, termasuk administrasi izin dan surat tugas, Pemrosesan penilaian kinerja pegawai (SKP dan e-Kinerja), Pengelolaan arsip kepegawaian dan surat-menyerat kedinasan. Adapun sub kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

8. Sasaran Kinerja Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas. Adapun sub kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitas kunjungan tamu, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu membuat KAK peralatan dan perlengkapan kantor berupa penyediaan barang/jasa, penyediaan bahan logistik kantor berupa barang pakai habis, penyediaan bahan cetak dan penggandaan, dan pemesanan makan dan minum jamuan tamu, memfasilitasi tamu yang datang ke Bakesbangpol Kabupaten Banjar, pengajuan permohonan kepada PP dan PPK, melakukan proses melalui ekatalog melalui PPK atau PP, negosiasi dengan penyedia, pembuatan surat pesanan, pengiriman barang/jasa, pembuatan BA serah terima, pembayaran,

membuat surat tugas untuk melakukan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD baik dalam maupun luar daerah, melakukan perjalanan dinas, dan membuat laporan setelah melakukan perjalanan dinas.

9. Sasaran Kinerja Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “Persentase Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan yang berkualitas” Adapun sub kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya. Keberhasilan pencapaian target kinerja karena lancarnya proses sesuai dengan aturan yaitu pembuatan KAK dan spesifikasi barang, pengajuan permohonan kepada PP dan PPK, melakukan proses melalui e-katalog melalui PPK atau PP, negosiasi dengan penyedia, pembuatan surat pesanan, pengiriman barang/jasa, pembuatan BA serah terima, dan pembayaran. Pengadaan terdiri dari pengadaan peralatan computer, printer, laptop, cctv, tab dan meja kursi tamu.

10. Sasaran Kinerja Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas. Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang berkualitas adalah persentase laporan jasa penunjang pelayanan umum yang disusun sesuai standar kualitas dari total laporan yang wajib disusun. Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang berkualitas adalah persentase laporan jasa penunjang pelayanan umum yang disusun sesuai standar kualitas dari total laporan yang wajib disusun. Adapun sub kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Lancarnya proses penggajian Non ASN sesuai aturan yang berlaku menjadi faktor keberhasilan kinerja.

11. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah

Indikator kinerja atas sasaran kinerja ini adalah “Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas”. Terpeliharanya barang milik daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan adalah persentase unit sarana dan prasarana (BMD) yang tersedia dan sesuai kebutuhan serta memenuhi standar kualitas (berfungsi dengan baik dan layak pakai). Adapun sub kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah penyediaan jasa

pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Selain itu, tahapan aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja sehingga menunjukkan keberhasilan kinerja yaitu membuat telaahan staf untuk kegiatan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang akan dipelihara, membuat telaahan staf semua peralatan dan mesin yang akan dipelihara, membuat KAK kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, membuat nota pencairan dana, dan melakukan kegiatan perbaikan/pemeliharaan peralatan yang rusak.

## 12. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sasaran ini didukung oleh Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, yang dijabarkan ke dalam beberapa sub kegiatan, yaitu:

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Dalam rangka mendukung capaian target kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan beberapa aktivitas, antara lain:

- a. Kepala Bidang memastikan seluruh kegiatan dirancang tepat sasaran, termasuk penentuan lokasi, segmentasi peserta, serta materi sosialisasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Melakukan koordinasi aktif dengan kecamatan, instansi terkait, tokoh masyarakat, serta stakeholder lainnya untuk memperluas jangkauan kegiatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

- c. Melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, baik dari sisi substansi maupun administrasi.
- d. Mengarahkan agar kegiatan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga interaktif dan berdampak, misalnya melalui diskusi, studi kasus, atau pelibatan narasumber yang kompeten.

13. Sasaran Kinerja Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, yang dijabarkan ke dalam beberapa sub kegiatan, yaitu:

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Dalam rangka mendukung capaian target kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan beberapa aktivitas, antara lain:

- Pada hari Kamis, 05 Februari 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar melalui Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama melaksanakan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan. Kegiatan ini bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.
- Pada hari Kamis, 26 Februari 2026, dilaksanakan Sosialisasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang bertempat di Aula Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai kebangsaan di masyarakat,

sekaligus mendukung pencapaian indikator kinerja pada Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

14. Sasaran Kinerja Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya”. Adapun kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya dengan Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kecamatan Tatah Makmur 04 Februari 2026 60 peserta terdiri dari kepala desa, BPD, tokoh agama, tokoh Masyarakat
- b. Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di SMP Mitra Kasih Kecamatan Kertak Hanyar 12 Februari 2026 peserta terdiri dari 100 siswa/i pelajar SMP Mitra Kasih

15. Sasaran Kinerja Meningkatnya peran FKUB dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “Persentase Rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti” Adapun kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya dengan Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Moderasi Kerukunan Umat Beragama di Sekolah, di SMPN 3 Gambut 100 siswa/i pelajar hari Kamis tanggal 29 Januari 2026
- b. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan di Daerah Kabupaten Banjar di Kecamatan Kertak Hanyar 60 orang peserta 27 Februari 2026 peserta terdiri dari tokoh agama masing masing agama, tokoh masyarakat, kepala desa

#### 16. Sasaran Kinerja Meningkatnya etika dan budaya politik

Indikator Kinerja pada sasaran ini adalah “Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik”. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah partai politik penerima bantuan keuangan yang telah melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi kadernya dengan jumlah seluruh partai politik penerima bantuan keuangan pada periode yang sama.

Capaian indikator diperoleh setelah realisasi anggaran bantuan keuangan partai politik disalurkan dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pendidikan politik bagi kader dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Sasaran ini didukung melalui Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan pada bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, peran Kepala Bidang diwujudkan melalui:

- a. Menyusun perencanaan teknis kegiatan pendidikan politik yang selaras dengan indikator kinerja, termasuk penetapan target partai politik penerima bantuan yang wajib melaksanakan pendidikan politik.
- b. fasilitasi, arahan, dan pembinaan kepada partai politik penerima bantuan keuangan agar melaksanakan kegiatan pendidikan politik secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

- c. Melakukan koordinasi dengan partai politik, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pelaksanaan pendidikan politik berjalan efektif, terintegrasi, dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi.

#### 17. Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan

Adapun kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Aktivasnya adalah monitoring ormas dan pembinaan ormas. Pada sasaran ini aktivitas yang dilaksanakan adalah Pembagian Tugas dan Arah Kerja dengan Memberikan arahan teknis serta membagi tugas secara jelas kepada Kasubid dan staf sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kegiatan monitoring dan pembinaan ormas. Briefing dan Koordinasi Rutin dengan Melaksanakan briefing sebelum dan sesudah kegiatan untuk memastikan kesamaan pemahaman, kesiapan pelaksanaan, serta evaluasi hasil kegiatan di lapangan. Pengendalian dan Supervisi Pelaksanaan dengan Melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas Kasubid dan staf agar kegiatan berjalan sesuai rencana dan target kinerja.

#### 18. Sasaran Kinerja Terselenggaranya pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat.

Sasaran ini didukung oleh sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat di Aula Bakesbangpol Kabupaten Banjar 19 Februari 2026.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan teknis kegiatan Menyiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik, meliputi penyusunan konsep acara, penyiapan materi, penentuan narasumber, serta kelengkapan administrasi kegiatan.
2. Koordinasi pelaksanaan Melaksanakan koordinasi dengan pihak internal (bidang dan staf) serta pihak eksternal (narasumber, peserta, dan instansi terkait) guna memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.

3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Mengelola pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat agar berlangsung tertib, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pengelolaan peserta dan dokumentasi Mengatur kehadiran peserta melalui daftar absensi serta memastikan dokumentasi kegiatan, seperti foto, notulen, dan laporan, tersusun dengan baik sebagai bukti dukung.
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk tingkat partisipasi dan pemahaman peserta, sebagai bahan perbaikan pada kegiatan selanjutnya.
6. Penyusunan laporan kegiatan Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara lengkap, sistematis, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban serta bahan pengukuran capaian kinerja.

#### 19. Sasaran Kinerja Meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan

Aktivitas yang menunjang pada sasaran kinerja meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan melalui sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah adalah sebagai berikut :

- a. terlaksananya sosialisasi pembinaan dan pengawasan ormas di hotel roditha banjarbaru tanggal 09 februari 2026
- b. terlaksananya kegiatan senam sehat bersama ormas di halaman guesthouse sultan sulaiman kab.banjar tanggal 13 februari 2026
- c. terlaksananya kegiatan Peningkatan Kerohanian Untuk Ormas di halaman guesthouse sultan sulaiman kab.banjar tanggal 23 februari 2026

#### 21. Sasaran Kinerja Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “ Persentase konflik sosial yang diselesaikan” Adapun kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Selain itu, aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu Melaksanakan langkah antisipasi terkait pencegahan konflik yang ada di wilayah Kabupaten Banjar.

## 22. Sasaran Kinerja Meningkatnya kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “ Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen”. Adapun kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Adapun aktivitas pada sasaran ini adalah

1. Penyuluhan kewaspadaan dini kepada masyarakat
2. Pelatihan peningkatan kapasitas FKDM, aparat desa, dan tokoh masyarakat dalam mengidentifikasi dan melaporkan potensi gangguan keamanan.
3. Forum koordinasi antarinstansi (Kesbangpol, TNI, Polri, BINDA, FKDM) terkait informasi intelijen sosial.
4. Distribusi bahan informasi edukatif terkait kewaspadaan terhadap paham radikal, intoleransi, dan isu disintegrasi.

## 23. Sasaran Kinerja Meningkatnya tindak lanjut penanganan potensi konflik sosial

Indikator Kinerja pada sasaran kinerja ini adalah “ Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti” Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas deteksi dini dan respons pemerintah daerah atau instansi seperti Kesbangpol, FKDM, atau Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam menindaklanjuti potensi konflik yang muncul di masyarakat. Adapun kegiatan yang dipakai untuk mensupport pelaksanaan target kinerja adalah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Aktivitas pada sasaran ini adalah Rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) secara berkala untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti laporan konflik. Monitoring lapangan dan investigasi awal terhadap isu konflik yang muncul. Penyusunan laporan tindak lanjut konflik sosial kepada kepala daerah dan stakeholder terkait.

### **A.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi pimpinan tentang capaian kinerja antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperkuat perencanaan berbasis kinerja serta memastikan kesesuaian antara target dan alokasi anggaran agar capaian kinerja lebih optimal.
2. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala, khususnya

terhadap kegiatan yang realisasinya masih rendah, untuk memastikan kendala yang dihadapi dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.

3. Mengoptimalkan koordinasi antarbidang dan dengan instansi terkait guna mempercepat pelaksanaan kegiatan strategis serta meminimalkan hambatan administratif.
4. Menyiapkan langkah tindak lanjut pada Triwulan I, terutama untuk kegiatan yang masih berjalan, agar seluruh target kinerja tahunan dapat tercapai sesuai dengan rencana dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.

Tindak Lanjut tentang capaian kinerja antara lain:

1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang masih berjalan dengan memastikan seluruh tahapan administrasi dan teknis terlaksana tepat waktu.
2. Menyusun jadwal monitoring dan evaluasi internal secara rutin untuk memantau progres realisasi anggaran dan capaian kinerja hingga akhir tahun.
3. Mengintensifkan koordinasi dengan pihak terkait, baik internal maupun eksternal, guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan penyelesaian kegiatan.
4. Meningkatkan pembinaan dan supervisi kepada seluruh bidang agar pelaporan kinerja dan keuangan tersusun lebih tertib, akurat, dan tepat waktu.

## **B. Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran Triwulan I Tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar sebesar Rp. 14.229.455.400,-. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran yang berhasil dikelola hingga akhir Triwulan I mencapai Rp. 1.978.028.471,- atau 13,90% dari total alokasi anggaran. Persentase realisasi ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 masih relatif rendah dibandingkan dengan total alokasi yang tersedia. Hal ini merupakan kondisi yang umum terjadi pada awal tahun anggaran, mengingat sebagian besar kegiatan masih dalam tahap persiapan, seperti proses perencanaan teknis, administrasi, serta pengadaan barang dan jasa.

Meskipun demikian, capaian sebesar 13,90% tetap perlu menjadi perhatian agar pada triwulan berikutnya dapat dilakukan percepatan pelaksanaan program

dan kegiatan. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan koordinasi antar bidang, percepatan proses administrasi, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan perlu segera dilakukan.

Dengan upaya percepatan tersebut, diharapkan realisasi anggaran pada triwulan selanjutnya dapat meningkat secara signifikan sehingga target kinerja dan serapan anggaran Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan..Pencapaian realisasi anggaran dapat dilihat dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Realisasi anggaran Sasaran strategis / Sasaran Kinerja**

No.	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target trw 1		Realisasi trw 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di di daerah	indeks Demokrasi indonesia	0	Persen	0.00	N/A	1,452,233,434	394,239,310	27,15
2	Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	0	Nilai Indeks	0	N/A	352,690,000	48,307,000	11,39
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0	Persen	0	N/A	5,783,994,445	5,225,737,605	90,35
4	Meningkatnya kepatuhan dan Kinerja Intern perangkat daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	Persen	0	N/A	5,783,994,445	5,225,737,605	90,35
5	terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan ,Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	30	Persen	30.00	100.00%	24,479,000	4,130,000	6,77
6	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	25	Persen	25	100.00%	3,495,553,000	1,188,296,073	26,64
7	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	25	Persen	25	100.00%	20,000,000	8,245,917	20,61

8	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	25	Persen	25	100.00%	181,174,000	78,431,334	21,82
9	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100	Persen	62.5	62.50%	211,140,000	113,716,000	53,86
10	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas	25	Persen	25	100.00%	116,860,000	89,519,500	21,42
11	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	25	Persen	25	100.00%	238,430,000	53,143,337	12,99
12	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	25	Persen	25	100.00%	299,188,000	77,049,220	5,05
13	Meningkatnya kualitas kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di Bidang Ekososbud yang dikeluarkan sesuai standar	0	Persen	0	N/A	369,229,600	112,808,000	13,84
14	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	82	Persen	80	97.56%	299,188,000	77,049,220	5,05
15	Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	82	Persen	80	97%	369,229,600	112,808,000	13,84
16	Meningkatnya peran FKUB dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama	Persentase Rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti	100	Persen	100	100.00%	369,229,600	112,808,000	13,84
17	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	25	Persen	25	100.00%	337,948,334	17,551,000	0,42
18	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif melaporkan keberadaannya	41	Persen	40.21	98.07%	352,690,000	48,307,000	11,39
19	Terseleenggaranya pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat	Persentase kegiatan pembinaan dan pendidikan	25	Persen	25	100.00%	337,948,334	17,551,000	0,42

		politik yang terlaksana							
20	Meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)	91.2	Persen	90.70	99%	352,690,000	48,307,000	11,39
21	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100	Persen	100	100.00%	445,867,500	186,831,090	13,65
22	Meningkatnya kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	100	Persen	100	100.00%	445,867,500	186,831,090	13,65
23	Meningkatnya tindak lanjut penanganan konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	100.00%	445,867,500	186,831,090	13,65

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar pada Triwulan I Tahun 2026 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Dari total alokasi anggaran sebesar Rp 14.229.455.400,-, realisasi anggaran mencapai Rp. 1.978.028.471,- atau 13,90%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada awal tahun telah berjalan sesuai tahapan perencanaan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Persentase realisasi tersebut masih tergolong wajar mengingat sebagian besar kegiatan strategis dan belanja operasional dilaksanakan secara bertahap pada triwulan berikutnya.

Jika untuk format laporan evaluasi/SAKIP, bisa Sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian yang tinggi, bahkan beberapa melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta kualitas pelayanan publik. Beberapa faktor keberhasilan antara lain koordinasi yang baik antarbidang, tertib administrasi keuangan dan kepegawaian, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pembinaan ideologi Pancasila, politik, dan ketahanan sosial budaya.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian, seperti pelaksanaan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) yang dijadwalkan pada Triwulan IV. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah percepatan serta koordinasi lebih intensif dengan lembaga terkait agar seluruh target kinerja tahunan dapat tercapai tepat waktu.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada Triwulan I mencerminkan kinerja positif dan menjadi dasar yang kuat bagi pelaksanaan program di Triwulan II guna mewujudkan sasaran strategis Bakesbangpol Kabupaten Banjar dalam mendukung terciptanya stabilitas politik, peningkatan kesadaran ideologi, serta penguatan persatuan dan kesatuan di daerah.

#### 4.2 Saran-Saran

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan sinkronisasi data. Perlu penguatan koordinasi antarbidang agar dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan lebih konsisten, akurat, dan terintegrasi.
2. Percepatan persiapan pengukuran indikator strategis. Diperlukan optimalisasi pengumpulan data dukung serta koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan capaian indikator seperti IDI, IKO, SAKIP, dan IKKI dapat terpenuhi pada akhir tahun.

3. Penguatan pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Perlu peningkatan intensitas pembinaan, perluasan jangkauan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, serta pendampingan legalitas dan administrasi ormas.
4. Optimalisasi peran kelembagaan (FKDM dan FKUB). Diperlukan peningkatan kapasitas, dukungan fasilitas, dan sinergi lintas sektor guna memperkuat deteksi dini serta pencegahan konflik sosial di daerah.
5. Peningkatan pengelolaan internal. Perlu peningkatan ketelitian dalam pengelolaan keuangan, perencanaan sarana prasarana, serta pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**Martapura, 8 April 2026**

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Banjar



**dr. H. Tofik Norman Hidayat**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19730319 200501 1 010



*Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.*



## LAMPIRAN